



RENJA **(RENCANA KERJA)** **Tahun 2021**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Jln. Brawijaya No.231 Pungging, Telp. (0321)390211 Fax. (0321)390210

KATA PENGANTAR

Penyusunan Kerja (Renja) Tahun 2021, Merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto 2016-2021. Dalam Renja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini terdapat 5 (Delapan) Program dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Kegiatan.

Harapan kami semoga Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, Lokasi Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2021 dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD	18
2.4. Review Terhadap Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	29
3.3. Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Awal OPD, renstra OPD serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

awal OPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada awal OPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas awal OPD yang disusun ke dalam Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam awal OPD.

renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh DPRKP2, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD

berdasarkan usulan program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
- o. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tatakerja Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
- f. Memberikan acuan bagi OPD dalam menjangkau tujuan / indikator tujuan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKOPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian

tahun berjalan, Analisis Kinerja OPD dan Isu-isu penting Tugas dan Fungsi OPD serta Review terhadap Awal RKOPD dan Kajian usulan Program dan Kegiatan..

BAB III. Tujuan, sasaran, Perangkat Daerah

Berisi ulasan terhadap Kebijakan Nasional tujuan dan sasaran OPD serta Faktor 2 yang menjadikan bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
Pelaksanaan kegiatan DPRKP2 Tahun 2021 selaras dengan kegiatan DPRKP2 Tahun 2020 adapun secara rinci sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Kesekretariatan

Pencapaian kinerja program pelayanan kesekretariatan adalah terpenuhinya kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian.

Kegiatan :

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran DPRKP2.
- b) Pengelola Administrasi Perkantoran DPRKP2.
- c) Ketatausahaan dan kepegawaian DPRKP2.

2) Program perumahan prasarana sarana dan utilitas umum

Pencapaian kinerja adalah persentase peningkatan kualitas perumahan

Kegiatan :

- a. Penunjang TIM verifikasi PSU perumahan.
- b. Sosialisasi Perda dan Perbup PSU perumahan.
- c. Pemeliharaan PSU perumahan.
- d. Updating data perumahan.
- e. Sosialisasi atau pembinaan pengembang dan pengawasan terhadap perumahan.
- f. Pendamping DAK (Dana Alokasi Khusus).
- g. Pendamping bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
- h. Penyusunan data backlog.

- i. Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) non swadaya.

3) Program Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pencapaian kinerja adalah Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni.

Kegiatan :

- a. Penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman
- b. Pembangunan sarana pendukung kawasan permukiman
- c. Pemetaan kekumuhan pada kawasan permukiman Kecamatan Mojosari
- d. BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- e. BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah
- f. BOP rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan
- g. Pemeliharaan makam bupati mojokerto
- h. Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman.
- i. Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) pada tahun 2021 masih tumpeng tindih antara dikelola DPRKP2 atau DPU
- j. BOP Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) pada tahun 2021 masih tumpeng tindih antara dikelola DPRKP2 atau DPU

4) Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pencapaian Kinerja Adalah Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas.

Kegiatan :

- a. Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)

- b. Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- c. Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi
- Forum LLAJ
- d. Duta Tertib Lalu Lintas
- e. Pengamanan insidentil
- f. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan
- g. Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Pengadaan sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE)
- i. Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas
- j. Reviu Dokumen Tatralok
- k. Pengadaan/Peningkatan Fasilitas Penunjang jalan

7) Program Prasarana Sarana Lalu Lintas

Adalah terfasilitasinya sarana prasarana jalan yang terpasang

Kegiatan :

- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- b. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
- c. Pengadaan Flasher / Warning Light
- d. Pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi terminal
- e. Pengadaan rambu APIL

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2018			Target Program Dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7=9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	100							
	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran DPRKP2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	90							
	2. Pengelolaan administrasi keuangan DPRKP2	Jumlah laporan keuangan yang disusun	100							

		3. Ketatausahaan dan kepegawaian DPRKP2	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100								
--	--	---	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

		Program Perumahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase peningkatan kualitas perumahan	100								
		1. Kegiatan Penunjang Tim Verifikasi PSU Perumahan	Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	100								
		2. Sosialisasi Perda dan Perbup PSU Perumahan	Prosentase Pemahaman Perda dan Perbup PSU Perumahan	100								
		3. Pemeliharaan PSU Perumahan	3. Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan (JALAN POROS)	100	0	0	0	0	65	0	100	
		4. Updating Data Perumahan	Persentase terpenuhinya Data Perumahan	100								
		5. Sosialisasi atau Pembinaan Pengembang dan Pengawasan terhadap Perumahan	Terlaksananya Soisialisasi atau Pembinaan pengembang dan pengawasan terhadap perumahan	100								
		6. Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK)	Prosentase Lingkungan yang	100	98	98	98	100	100	0	100	

				Memenuhi Standar Kesehatan								
			7. Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	100							
			8. Penyusunan Data Backlog	8. Ter-update-nya Data backlog Perumahan	100							
			9. Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non Swadaya	9. Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	100	0	0	0	0	100	0	100
<hr/>												
			Program Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	100							
			1. Penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman	1. Berkurangnya skor kekumuhan rata-rata pada lokasi SK kumuh	100							
			2. Pembangunan sarana pendukung kawasan permukiman	2. Berkurangnya skor kekumuhan rata-rata pada lokasi NON kumuh	100	0,089	0	0,139	0,139	0	-	0
			3. Pemetaan kekumuhan pada kawasan permukiman kec. Mojosari	3. Tersusunnya data kawasan kumuh di Kec. Mojosari	100							
			4. BOP kota tanpa kumuh (KOTAKU)	4. Terlaksananya kegiatan pemerintah pusat kota tanpa kumuh	100	76,27	0	0	0	100	0	100

			7. BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah	7. Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan	100	45	65	45	45	65	-	100
			8. BOP rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan	8. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan tanah	100	15,30	0	0	0	100	-	100
			9. Pemeliharaan makam bupati mojokerto	9. Terpeliharanya bangunan bersejarah makam mantan bupati mojokerto	100							
			10. Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman	10. Tersusunnya peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman	100	0	0	0	0	100	-	100
<hr/>												
			Program Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas	100							
			1. Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)	1. Meningkatnya Koordinasi antar Instansi Pembina Jalan dan Pengguna Jalan	100	73,33	90	249	2.766	90	-	100
			2. Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2.Terselenggaranya Operasi dan PAM	100	97,54	90	247	2.744	90	-	100

			3. Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ	3. Terlaksananya Forum Lalu Lintas	100	93,81	90	249	2.766	90	-	100
			4. Duta Tertib Lalu Lintas	4. Terlaksananya Duta Tertib Lalu Lintas	100	83,47	87	249	2.766	90	-	100
			5. Pengamanan insidentil	5.Terselenggaranya Operasi dan PAM	100	75,89	90	247	2.744	90	-	100
			6. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	6. Meningkatnya Koordinasi antar Instansi Pembina Jalan Dalam Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya	100	87	0	249	2.766	90	-	100
			7. Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	7.Terehabilitasinya / Terkalibrasinya Alat Uji Kendaraan Bermotor	100	98,83	90	249	2.766	90	-	100
			8. Pengadaan sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE)	8. Indeks Kepuasan Masyarakat tentang layanan Perhubungan	100							
			9. Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	10. Tersedianya dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas	100	87	90	249	2.766	90	-	100
			10. Reviu Dokumen Tatralok	11. Tersedianya Dokumen Tatralok	100							
			11.Pengadaan/Peningkatan Fasilitas Penunjang jalan	12. Ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan	100							
			Program Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan	92							

				yang terpasang dan layak fungsi								
			1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	1. Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang	90	98,11	65	193,82	65	65	-	100
			2. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	2. Meningkatnya pengelolaan perparkiran	95	99,84	90	199,34	2.766	100	-	100
			3. Pengadaan Flasher / Warning Light	3. meningkatnya pelayanan lalulintas	90	0	0	0	0	100	-	100
			4. Pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi terminal	4. Terbangunnya terminal Trowulan dan Brangkal	95							
			5. Pengadaan rambu APIL	5. Meningkatnya pelayanan lalulintas	90	0	0	0	0	65	-	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan fungsi pelayanan OPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada OPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan OPD, serta analisa capaian pendapatan asli daerah yang berisi tentang target pendapatan asli daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang retribusi parkir berlangganan.

Target Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto selama periode Perubahan Renstra 2016-2021 bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel.T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra (SPM)SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	2020 (n)	2021 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase lingkungan peningkatan kualitas lingkungan perumahan			25	33,33	50	50	25	33,33	50	50	
2.	Persentase Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Layak Huni			0,05	0	80	80	0,05	0	80	80	
3.	Persentase fasilitas sarana prasarana jalan yang terpasang layak fungsi			60	65	65	65	60	65	65	65	
4.	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas dan Kelancaran Lalu Lintas			100	100	100	100	0,05	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan OPD

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan di evaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan OPD. Keberhasilan tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto akan berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Mojokerto.

2. Pernasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dipengaruhi oleh faktor Lingkungan strategis. Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan

(*strengths*) (S) dan kelemahan (*weakness*) (W) dan lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) (O) dan tantangan (*threats*) (T).

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan.

Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*) yang merupakan faktor penentu yang dipandang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan menerapkan metode analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities dan threats*). Implementasi metode ini akan membantu OPD untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila OPD mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

a. Permasalahan :

1. Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang dan permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas
3. Belum optimalnya kinerja aparat sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional

4. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
 5. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
 6. Keterbatasan sarana dan prasarana.
 7. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
 8. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
 9. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (*reward and punishment*).
 10. Masih kurang mantapnya kinerja lembaga akibat tumpang tindihnya tupoksi antar instansi.
 11. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
 12. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
 13. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
 14. Masih kurang sinergisnya diantara masing-masing sub dinas dalam hal pelaksanaan kegiatan.
 15. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.
- b. Hambatan
1. Terbatasnya anggaran operasional
 2. Letak kantor terlalu jauh dengan pusat pemerintahan
 3. Terbatasnya sarana prasarana operasional
 4. Terbatasnya tenaga operasional teknis
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional

Dalam mencapai sasaran dan prioritas nasional pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan belum bisa di optimalkan dikarenakan semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni, adapun semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.

Pengembangan sector/ komoditas/kegiatan unggulan daerah berpengaruh kepada meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik peribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas serta tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas yang kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.

4. Formulasi isu-isu penting

- a. Pemerataan Rumah Layak Huni bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto
- b. Peningkatan fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
- c. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
- d. Semakin berkembangnya industri properti.
- e. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
- f. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
- g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.

h. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibukota propinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.

2.4. Review Terhadap Awal RKPD

1. Perbandingan Antara Ranwal RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Membandingkan antara Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Perumusan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Berkaitan dengan hal tersebut maka ada beberapa usulan program dan kegiatan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang tidak sesuai dengan dari Ranwal RKPD. Dapat diperhatikan pada Tabel T-C 33 Rumus rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2021

Dan prakiraan maju tahun 2022.

2. penjelasan Alasan Proses dilakukan

Tupoksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Maka susuai dengan Instruksi Permendagri 86 tahun 2017 dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perlu memperhatikan Tabel 4.2 Persandingan Prioritas Kabupaten Mojokerto dengan Nasional pada Ranwal RKPD Tahun 2021. Parihal tersebut bertujuan untuk mencapai target kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

3. Penjelasan Temuan Dan Catatan Penting Terhadap Perbedaan Dengan Ranwal RKPD Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto akan di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Awal RKPD Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Mojokerto

No.	Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	DPRKP2	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	100	2,000,746,081	Program Pelayanan Kesekretariatan	DPRKP2	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	100	2,270,000,000	
2	Program Perumahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	DPRKP2	Persentase peningkatan kualitas perumahan	100	699,780,000	Program Perumahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	DPRKP2	Persentase peningkatan kualitas perumahan	100	2,605,000,000	
3	Program Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	DPRKP2	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	100	322,780,000	Program Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	DPRKP2	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	100	1,350,000,000	
4	Program Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPRKP2	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas		4,029,730,000	Program Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPRKP2	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas		4,410,000,000	
5	Program Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas	DPRKP2	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang dan layak fungsi		1,705,850,000	Program Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas	DPRKP2	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang dan layak fungsi		5,800,000,000	
TOTAL					8,758,886,081	TOTAL					16,160,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait Langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang Langsung ditujuhkan kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Melalui Musrenbang Kecamatan tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu Musrenbang Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi / perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil Musrenbang Kecamatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada usulan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021 kegiatan prioritas dari usulan kecamatan yaitu untuk kegiatan Pemasangan rambu-rambu jalan kabupaten, pengadaan cermin cembung sudut jalan dan penerangan jalan PJU sudah diakomodir pada kegiatan pengadaan rambu apil yang akan dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2.5
Daftar Usulan Musren cam RKPD 2021

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Vol	Satuan	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab	kecamatan
1	Pemasangan rambu-rambu jalan kabupaten		Ds. Ngingas Ngrembyong	1	Paket	20,000,000	DPRKP2	Sooko
2	Pengadaan cermin cembung sudut jalan		Ds. Balon gsari	6	Unit	50,000,000	DPRKP2	Gedeg
3	Penerangan jalan PJU		Ds. Kedunggempol	10	Titik	45,000,000	DPRKP2	Mojosari

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam urusan Perumahan dan Permukiman dengan kebijakan Nasional sebagaimana dimandat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 bahwa Pembangunan dan Pengembangan Kawasan perkotaan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Upaya pencapaian target selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016-2021 yang mengamanatkan 100 persen akses aman air minum, bebas kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2019. Indikator 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar. Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Sedangkan, untuk sektor sanitasi yaitu tersedianya sistem air limbah setempat sebesar 60%, tersediaanya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20% dan adanya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70% Target universal access pada 2019 mendatang bukanlah merupakan hal mudah yang bisa dicapai, pasalnya dalam memenuhi target ini perlu lompatan besar yang dilakukan. Terlebih, hingga kini capaian akses air minum aman dan sanitasi layak Indonesia masih kurang optimal.

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang

melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi .

TABEL 3.1

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

SASARAN		PRIORITAS		
		NASIONAL		KABUPATEN
2.	Pembangunan Infrastruktur	1. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.	Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah
		a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	a.	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
		b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	b.	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Bersinergi dengan AgroWisata dan UMKM dari hulu ke hilir
		c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	c.	Percepatan perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus
		d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi	d.	Peningkatan nilai tambah industri, perdagangan dan ekonomi kreatif melalui dengan memanfaatkan teknologi digital

		unggulan daerah		(industri 4.0), melalui peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran melalui e-commerce, dan peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi
		e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	e.	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar
		a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah	a.	Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah

a. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

Sasaran Perangkat Daerah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan

2. Meningkatnya infrastruktur kesehatan permukiman

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Program dan kegiatan di Tahun 2021 ini kami sesuaikan dengan Kerangka Logis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dasar Misi 7 Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto.

Program di usulan tahun 2021 sebanyak 5 dan usulan 38 Kegiatan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbang terhadap rumusan program kegiatan.

- Pemerataan Rumah Layak Huni bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Mojokerto
 - Peningkatan fasilitas sanitasi dan fasilitas umum bagi kawasan kumuh
 - Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
 - Semakin berkembangnya industri properti.
 - Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
 - Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
 - Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Jumlah Program dan Kegitan pada DPRKP2 terdiri dari 5 program 38 kegiatan yaitu:
 1. Program pelayanan kesekretariatan
 2. Program perumahan prasarana, sarana dan utilitas umum
 3. Program kawasan permukiman dan pertanahan
 4. Program lalu lintas angkutan jalan
 5. Program prasarana dan sarana lalu lintas
 - b. Jumlah Kegiatan
 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran DPRKP2.
 2. Pengelola Administrasi Perkantoran DPRKP2.
 3. Ketatausahaan dan kepegawaian DPRKP2.
 4. Penunjang TIM verifikasi PSU perumahan.
 5. Sosialisasi Perda dan Perbup PSU perumahan.
 6. Pemeliharaan PSU perumahan.
 7. Updating data perumahan.

8. Sosialisasi atau pembinaan pengembang dan pengawasan terhadap perumahan.
9. Pendamping DAK (Dana Alokasi Khusus).
10. Pendamping bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
11. Penyusunan data backlog.
12. Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) non swadaya.
13. Penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman
14. Pembangunan sarana pendukung kawasan permukiman
15. Pemetaan kekumuhan pada kawasan permukiman Kecamatan Mojosari
16. BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
17. BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah
18. BOP rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan
19. Pemeliharaan makam bupati mojokerto
20. Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman.
21. Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) pada tahun 2021 masih tumpeng tindih antara dikelola DPRKP2 atau DPU
22. BOP Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) pada tahun 2021 masih tumpeng tindih antara dikelola DPRKP2 atau DPU
23. Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)
24. Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
25. Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ
26. Duta Tertib Lalu Lintas
27. Pengamanan insidentil
28. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan
29. Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
30. Pengadaan sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE)
31. Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas
32. Reviu Dokumen Tatralok

33. Pengadaan/Peningkatan Fasilitas Penunjang jalan
34. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
35. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran
36. Pengadaan Flasher / Warning Light
37. Pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi terminal
38. Pengadaan rambu APIL

c. Total kebutuhan dana/ Pagu indikatif

Bagian ini menjelaskan tentang total kebutuhan dana dan pagu indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dijelaskan pada tabel T-C 33 dibawah ini.

3. Rumusan program kegiatan yang tidak sesuai dengan ranwal RKPD

Bagian ini menjelaskan tentang rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dijelaskan pada tabel T-C 33 dibawah ini.

4. Tabel renncana program dan kegiatan berdasarkan hasil penggerjaan tabel T-C 33

Bagian ini menjelaskan tentang renncana program dan kagiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil penggerjaan tabel T-C 33 dibawah ini.

Tabel T-C 33
 Rumus rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2021
 Dan prakiraan maju tahun 2022
 Kabupaten Mojokerto

Dinas Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

Kode	Urusan Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN	Percentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	100	Rp2.000.746.081,00	APBD		100	Rp2,497,000,000,00
	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran DPRKP2	Jumlah dokumen Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang tersusun	Kabupaten Mojokerto	7	Rp 50,000,000,00	APBD		100	Rp 16,500,000,00
	Pengelolaan administrasi keuangan DPRKP2	Jumlah laporan pengelolaan keuangan	Kabupaten Mojokerto	12	Rp 55,000,000,00	APBD		100	Rp 60,500,000,00
	Ketatausahaan dan kepegawaian DPRKP2	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang tersusun	Kabupaten Mojokerto	12	Rp1.895.746,081,00	APBD		100	Rp2,420,000,000,00

		PROGRAM PERUMAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 699.780.000,00	APBD		100	Rp 2,865,500,000,00
		Kegiatan Penunjang Tim Verifikasi PSU Perumahan	(Jumlah Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan/Total Lingkungan) x 100%	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 50,000,000,00	APBD		100	Rp 110,000,000,00
		Sosialisasi Perda dan Perbup PSU Perumahan	(Jumlah lingkungan yang memahami Perda dan Perbup PSU Perumahan/Jumlah lingkungan perumahan) x 100%	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 50,000,000,00	APBD		100	Rp 55,000,000,00
		Pemeliharaan PSU Perumahan	(Jumlah Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan (JALAN POROS/Jumlah lingkungan) x 100%	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 200,000,000,00	APBD		100	Rp 550,000,000,00
		Updating Data Perumahan	(Jumlah data perumahan yang di update/Jumlah data perumahan) x 100%	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 50,000,000,00	APBD		100	Rp 110,000,000,00
		Sosialisasi atau Pembinaan Pengembang dan Pengawasan terhadap Perumahan	Jumlah kegiatan Pembinaan Pengembang dan Pengawasan terhadap Perumahan	Kabupaten Mojokerto	4 pembinaan	Rp 30,000,000,00	APBD		100	Rp 33,000,000,00
		Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah kegiatan Pendamping Dana	Kabupaten Mojokerto	1 kegiatan	Rp 100,000,000,00	APBD		100	Rp 220,000,000,00

			Alokasi Khusus (DAK) yang terpenuhi						
		Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 69,780,000.00	APBD		100 Rp 82,500,000.00
		Penyusunan Data Backlog	Ter-update-nya Data backlog Perumahan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 150,000,000.00	APBD		100 Rp 330,000,000.00
		Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non Swadaya	Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabupaten Mojokerto				100	Rp 1,155,000,000.00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Percentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 322,780,000.00	APBD		100 Rp 1,485,000,000.00
		Penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman	skor kekumuhan rata-rata pada lokasi SK kumuh	Kabupaten Mojokerto	10 skor	Rp 50,000,000.00	APBD		100 Rp 220,000,000.00
		Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman	Jumlah peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman yang tersusun	Kabupaten Mojokerto	1 Perbup	Rp 32,780,000.00	APBD		100 Rp 55,000,000.00
		Pembangunan sarana pendukung kawasan permukiman	Jumlah sarana pendukung kawasan permukiman yang terbangun	Kabupaten Mojokerto	1 Sapras	Rp 50,000,000.00	APBD		100 Rp 220,000,000.00
		Pemetaan kekumuhan pada kawasan permukiman kec. Mojosari	Tersusunnya data kawasan kumuh di Kec. Mojosari	Kabupaten Mojokerto	1 data	Rp 50,000,000.00	APBD		100 Rp 110,000,000.00
		BOP kota tanpa kumuh (KOTAKU)	Jumlah BOP kegiatan pemerintah pusat	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 30,000,000.00	APBD		100 Rp 82,500,000.00

			kota tanpa kumuh yang terpenuhi						
		BOP penyediaaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMISMAS)	Jumlah BOP penyediaaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMISMAS) yang terpenuhi	Kabupaten Mojokerto	1 BOP	Rp 50,000,000.00	APBD		
		BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah	Jumlah BOP kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah yang terpenuhi	Kabupaten Mojokerto	1 BOP	Rp 30,000,000.00	APBD	100	Rp 55,000,000.00
		BOP rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan	Jumlah BOP kegiatan rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan yang terpenuhi	Kabupaten Mojokerto	1 BOP	Rp 30,000,000.00	APBD	100	Rp 55,000,000.00
		Pemeliharaan makam bupati mojokerto	Jumlah bangunan bersejarah makam mantan bupati mojokerto yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	1 bangunan		APBD	100	Rp 550,000,000.00
		PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas	Kabupaten Mojokerto	100	Rp1,705,850,000.00	APBD	100	Rp4,851,000,000.00
		Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)	Meningkatnya Koordinasi antar Instansi Pembina Jalan dan Pengguna Jalan	Kabupaten Mojokerto	1 kegiatan	Rp 110,000,000.00	APBD	100	Rp 121,000,000.00

		Reviu Dokumen Tatralok	Jumlah Reviu Dokumen Tatralok	Kabupaten Mojokerto	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD		100	Rp 110,000,000.00
		Pengadaan/Peningkatan Fasilitas Penunjang jalan	Jumlah Fasilitas Penunjang jalan yang diadakan	Kabupaten Mojokerto	3 Fasiitas	Rp 295,850,000.00	APBD		100	Rp 3,300,000,000.00
		Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah kegiatan Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kabupaten Mojokerto	3 Kegiatan	Rp 150,000,000.00	APBD		100	Rp 165,000,000.00
		Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ	Jumlah rapat koordinasi Forum Lalu Lintas	Kabupaten Mojokerto	20 Rakor	Rp 200,000,000.00	APBD		100	Rp 220,000,000.00
		Duta Tertib Lalu Lintas	Jumlah Duta Tertib Lalu Lintas	Kabupaten Mojokerto	10 orang	Rp 100,000,000.00	APBD		100	Rp 110,000,000.00
		Pengamanan insidentil	Jumlah Kegiatan Operasi dan PAM	Kabupaten Mojokerto	20 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	APBD		100	Rp 220,000,000.00
		Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	Kabupaten Mojokerto	10 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	APBD		100	Rp 55,000,000.00
		Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	10 Sapras	Rp 250,000,000.00	APBD		100	Rp 275,000,000.00
		Pengadaan sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE)	Jumlah sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE) yang diadakan	Kabupaten Mojokerto	1 SI	Rp 150,000,000.00	APBD		100	Rp 165,000,000.00
		Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	Tersedianya dokumen	Kabupaten Mojokerto	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD		100	Rp 110,000,000.00

			manajemen dan rekayasa lalu lintas						
		PROGRAM PRASARANA DAN SARANA LALU LINTAS	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang dan layak fungsi	Kabupaten Mojokerto	92	Rp4,029,730,000.00	APBD		92 Rp6,380,000,000.00
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas yang terpelihara	Kabupaten Mojokerto	90	Rp 400,000,000.00	APBD		90 Rp 440,000,000.00
		Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Jumlah lahan parkir yang dikelola	Kabupaten Mojokerto	95	Rp1,000,000,000.00	APBD		95 Rp1,100,000,000.00
		Pengadaan Flasher / Warning Light	Jumlah Flasher / Warning Light yang diadakan	Kabupaten Mojokerto	90	Rp 400,000,000.00	APBD		90 Rp 440,000,000.00
		Pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi terminal	Jumlah terminal yang dibangun/dipelihara	Kabupaten Mojokerto	2 Terminal	Rp1,729,730,000.00	APBD		95 Rp3,850,000,000.00
		Pengadaan rambu APIL	Jumlah rambu APIL yang diadakan	Kabupaten Mojokerto	90	Rp 500,000,000.00	APBD		90 Rp 550,000,000.00
		TOTAL				Rp 8,758,886,081.00			Rp 17,776,000,000.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2021 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp 8,758,886,081,-** (Delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) adalah sebagaimana tabel berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (Usulan Prioritas dan Cadangan)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIA TAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi perkantoran, dan Peningkatan kinerja kepegawaian	Kabup aten Mojok erto	100	Rp2,270, 000,000.0 0	APBD	
	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran DPRKP2	1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Kabup aten Mojok erto	7	Rp 50,000,00 0.00	APBD	
	2. Pengelolaan administrasi keuangan DPRKP2	2. Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan	Kabup aten Mojok erto	12	Rp 55,000,00 0.00	APBD	

					3. Ketatausahaan dan kepegawaian DPRKP2	3. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan peningkatan SDM kepegawaian	Kabupaten Mojokerto	12	Rp1.894.746,000,00	APBD	
					PROGRAM PERUMAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 699.780.000,00	APBD	
					1. Kegiatan Penunjang Tim Verifikasi PSU Perumahan	1. Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 50,000,000,00	APBD	
					2. Sosialisasi Perda dan Perbup PSU Perumahan	2. Prosentase Pemahaman Perda dan Perbup PSU Perumahan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 50,000,000,00	APBD	
					3. Pemeliharaan PSU Perumahan	3. Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan (JALAN POROS)	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 200,000,000,00	APBD	
					4. Updating Data Perumahan	4. Ter-update-nya Data Perumahan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 50,000,000,00	APBD	
					5. Sosialisasi atau Pembinaan Pengembang dan Pengawasan terhadap Perumahan	5. Tercapainya Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan	Kabupaten Mojokerto	4 pembinaan	Rp 30,000,000,00	APBD	

					6. Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK)	6.Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabupaten Mojokerto	1 kegiatan	Rp 100,000,00.00	APBD	
					7. Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	7. Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 69,780,00.00	APBD	
					8.Penyusunan Data Backlog	8. Ter-update-nya Data backlog Perumahan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 150,000,00.00	APBD	
					9. Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Non Swadaya	9. Prosentase Lingkungan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabupaten Mojokerto			APBD	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Persentase kualitas sarana prasarana permukiman layak huni	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 322,780,00.00	APBD	
					1. Penataan dan pemeliharaan kawasan permukiman	1. Berkurangnya skor kekumuhan rata-rata pada lokasi SK kumuh	Kabupaten Mojokerto	10 skor	Rp 50,000,00.00	APBD	
					2. Pembangunan sarana pendukung kawasan permukiman	2. Berkurangnya skor kekumuhan rata-rata pada lokasi NON kumuh	Kabupaten Mojokerto	1 Perbu	Rp 32,780,00.00	APBD	

					3. Pemetaan kekumuhan pada kawasan permukiman kec. Mojosari	3. Tersusunnya data kawasan kumuh di Kec. Mojosari	Kabup aten Mojok erto	1 Sapras	Rp 50,000,00 0.00	APBD	
					4. BOP kota tanpa kumuh (KOTAKU)	4. Terlaksananya kegiatan pemerintah pusat kota tanpa kumuh	Kabup aten Mojok erto	1 data	Rp 50,000,00 0.00	APBD	
					7. BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah	7. Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan	Kabup aten Mojok erto	100	Rp 30,000,00 0.00	APBD	
					8. BOP rekomendasi perijinan permukiman dan pertanahan	8. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan tanah	Kabup aten Mojok erto	1 BOP	Rp 50,000,00 0.00	APBD	
					9. Pemeliharaan makam bupati mojokerto	9. Terpeliharanya bangunan bersejarah makam mantan bupati mojokerto	Kabup aten Mojok erto	1 BOP	Rp 30,000,00 0.00	APBD	
					10. Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman	10. Tersusunnya peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemakaman	Kabup aten Mojok erto	1 BOP	Rp 30,000,00 0.00	APBD	
					PROGRAM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	Persentase pelanggaran lalu lintas dan kelancaran arus lalu lintas	Kabup aten Mojok erto	1 bangunan	Rp 500,000,0 0.00	APBN	

		1. Penganugrahan Duta Tertib Lalu-lintas (Wahana Tata Nugraha)	1. Meningkatnya Koordinasi antar Instansi Pembina Jalan dan Pengguna Jalan	Kabupaten Mojokerto	100	Rp 1,705,850,000.00	APBD	
		2. Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	2. Terselenggaranya Operasi dan PAM	Kabupaten Mojokerto	1 kegiatan	Rp 110,000,000.00	APBD	
		3. Peningkatan Disiplin Masyarakat pengguna dan jasa transportasi Forum LLAJ	3. Terlaksananya Forum Lalu Lintas	Kabupaten Mojokerto	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD	
		4. Duta Tertib Lalu Lintas	4. Terlaksananya Duta Tertib Lalu Lintas	Kabupaten Mojokerto	3 Fasilitas	Rp 295,850,000.00	APBD	
		5. Pengamanan incidentil	5. Terselenggaranya Operasi dan PAM	Kabupaten Mojokerto	3 Kegiatan	Rp 150,000,000.00	APBD	
		6. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	6. Meningkatnya Koordinasi antar Instansi Pembina Jalan Dalam Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya	Kabupaten Mojokerto	20 Rakor	Rp 200,000,000.00	APBD	
		7. Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Terehabilitasinya / Terkalibrasinya Alat Uji Kendaraan Bermotor	Kabupaten Mojokerto	10 orang	Rp 100,000,000.00	APBD	

					8. Pengadaan sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE)	8. Indeks Kepuasan Masyarakat tentang layanan Perhubungan	Kabupaten Mojokerto	20 Kegiatan	Rp 200,000,000.00	APBD	
					9. Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	10. Tersedianya dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kabupaten Mojokerto	10 Kegiatan	Rp 50,000,000.00	APBD	
					10. Reviu Dokumen Tatralok	11. Tersedianya Dokumen Tatralok	Kabupaten Mojokerto	10 Sapras	Rp 250,000,000.00	APBD	
					11. Pengadaan/Peningkatan Fasilitas Penunjang jalan	12. Ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan	Kabupaten Mojokerto	1 SI	Rp 150,000,000.00	APBD	
					PROGRAM PRASARANA DAN SARANA LALU LINTAS	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang dan layak fungsi	Kabupaten Mojokerto	1 Dokumen	Rp 100,000,000.00	APBD	
					1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	1. Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang	Kabupaten Mojokerto	92	Rp 4,029,730,000.00	APBD	
					2. Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	2. Meningkatnya pengelolaan perparkiran	Kabupaten Mojokerto	90	Rp 400,000,000.00	APBD	
					3. Pengadaan Flasher / Warning Light	3. meningkatnya	Kabupaten	95	Rp 1,000,000,000.00	APBD	

							pelayanan lalulintas	Mojokerto				
							4. Pembangunan dan pemeliharaan rehabilitasi terminal	4. Terbangunnya terminal Trowulan dan Brangkal	Kabupaten Mojokerto	90	Rp 400,000,00.00	APBD
							5. Pengadaan rambu APIL	5. Meningkatnya pelayanan lalulintas	Kabupaten Mojokerto	2 Terminal	Rp1,729,730,000.00	APBD

BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

a. Catatan Penting

Sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto ada beberapa program yang mepunyai dana terbatas sehingga menghambat dalam mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto. Salah satu di antaranya adalah Pengadaan sistem pengujian kendaraan bermotor (DRIVE TRUE), jika tidak dipenuhi maka menghambat pelayanan. Hal ini berkaitan dengan mewujudkan misi ke 7 Bupati Mojokerto “Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat”.

b. Kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2022 yang akan datang.

c. Rencana tindak lanjut

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

